

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun revolusi fisik di era revolusi Indonesia (tahun 1945-1950) dan Parlementer (tahun 1950-1959), banyak gerakan yang coba mengubah ideologi Pancasila, tindakan-tindakan separatis yang mencoba menggoyahkan Pancasila sebagai ideologi negara adalah suatu kegiatan subversif yang dianggap membahayakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan separatis seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Republik Maluku Selatan, PKI Madiun, dan wilayah lainnya merupakan salah satu contoh gerakan yang mencoba menggoyahkan NKRI dan mencoba mengganti Pancasila sebagai ideologi.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi usaha kudeta oleh Partai Komunis Indonesia, yang menjadi perubahan secara politik secara besar-besaran. Peristiwa ini menjadi dasar bahwa gerakan radikalisme akan menjadi potensi besar dalam disintegrasi bangsa dan bernegara. Pada masa Orde Baru kegiatan disintegrasi bangsa coba di selesaikan dengancara diplomasi dan militer, seperti Gerakan Operasi Militer yang dilancarkan Orde Baru dalam meredam gerakan separatis seperti Gerakan Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan Timor Timur.

Di tahun 1998 Orde Baru mengakhiri Legitimasinya selama 32 tahun berkuasa, dan digantikan era Reformasi, Intepretasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai sebuah sakralisasi di era Orde Baru kemudian berubah dinamis di era Reformasi. Orde Baru sebagai sebuah periode kekuasaan memang memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik dibanding Orde Lama, Hal ini memang tidak dapat dilupakan, namun dalam hal Demokrasi terjadi sebuah sumbatan yang bermuara pada terjadinya krisis moneter 1998, hal ini yang akhirnya menjadikan Orde Baru berganti Orde Reformasi dimana Kebebasan berekspresi, melakukan ibadah dengan perasaan aman adalah konsekuensi logis di bukanya keran demokrasi yang menjadi tertutup saat Orde Baru.

Namun terbukanya keran informasi tentu menjadi dinamika tersendiri bagi masyarakat Indonesia, informasi yang didapatkan bisa saja berupa berita bohong atau hoak yang bertujuan untuk membuyarkan informasi yang sebenarnya atau menjadi sebuah propaganda dari kelompok tertentu untuk melawan kebijakan dari pemerintah. Akibat maraknya disinformasi tersebut, banyak terjadi kesimpangsiuran informasi. Dengan munculnya kesimpangsiuran informasi dan dibukanya keran demokrasi dengan perbedaan pendapat antara satu sama lain lalu muncul kembali sebuah masalah yang disebut dengan ujaran kebencian. Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Pidana terhadap ujaran kebencian dilakukan karena tindakan itu bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Dalam ujaran kebencian bisa saja terjadi karena kesalahpahaman individu maupun kelompok akan suatu informasi yang didapat. Seseorang pasti akan langsung menuliskan ujaran kebencian tanpa menginformasikan kebenaran informasi tersebut.

Peningkatan ujaran kebencian dalam ruang media sosial semakin mengkhawatirkan. Pengguna mudah sekali terpancing untuk melemparkan kebencian berkaitan dengan masalah politik, program pemerintah, dan urusan agama. Menurut Atwar Bajari dalam orasi ilmiah pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) dikatakan Dalam karya ilmiahnya, Atwar menyajikan data terkait ujaran kebencian dari media sosial dalam kurun 2018-2019 atau tahun politik karena saat itu Indonesia tengah melaksanakan pemilu hingga saat penanganan pandemi Covid-19. Menurut Atwar, jumlah berita bohong yang telah diidentifikasi dari Agustus 2018 sampai April 2019 sebanyak 1.731 konten. Bahkan, selama April 2019 saja, konten berupa kabar bohong

sehingga memicu ujaran kebencian sebanyak 486 unggahan. Di media sosial Facebook, ujaran kebencian terbilang tinggi dan disusul oleh twitter.

Jika tidak diperbaiki maka akan muncul permasalahan yang lebih serius dalam kerangka persatuan, dan tentunya akan merusak rencana Indonesia emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) yang menargetkan untuk mewujudkan negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif setelah 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Jika dikaitkan dengan nasionalisme atau cinta tanah air, maka ini menjadi persoalan yang menarik, karena jika memang mencintai tanah airnya mengapa terjadi tindakan yang merusak citra dan bangsa Indonesia itu sendiri. Kegiatan destruktif ini tidak hanya menyentuh masyarakat umum, namun sampai juga pada aparatur sipil negara, Pegawai aparatur sipil negara disebut pegawai ASN, Aparatur sipil Negara (ASN) merujuk pada UU No 5 Tahun 2004 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No.5 Tahun 2004). Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi memiliki nilai dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Diantara nilai dasar tersebut adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, dan mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Artinya, dalam UU ASN telah diatur nilai loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, pemerintah dan masyarakat, dengan kata lain, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah ditetapkan secara sah menjadi seorang ASN telah tertanam padanya nilai-nilai loyalitas serta kode etik melalui sumpah/janji sesuai dengan keyakinan agamanya. Nilai-nilai loyalitas tersebut dimaksudkan agar setiap ASN bisa mendorong agar birokrasi pemerintahan lebih berkualitas, bersih dari praktik-praktik KKN, efektif, efisien dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan publik

yang berkualitas (Ilmar, 2020). Melihat situasi seperti itu maka pemerintah menerbitkan Surat keputusan Bersama yaitu SKB ini resmi ditandatangani dan diluncurkan pada 12 November 2019. SKB ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Menteri Agama, Mendikbud, Menkominfo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Jika melihat standar yang digunakan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Menurut Peraturan Menteri No 27 tahun 2021 SKD Pasal 35 (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tes wawasan kebangsaan;
- b. tes intelegensia umum; dan
- c. tes karakteristik pribadi.

Bahwasanya Aparatur Sipil Negara memiliki asumsi pemahaman yang baik dalam wawasan kebangsaan. Karena materi yang diujikan dalam tes wawasan kebangsaan itu adalah meliputi: 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan: a) Nasionalisme; b) Integritas; c) Bela Negara; d) Pilar negara; e) Bahasa Indonesia; f) Pancasila; g) Undang-Undang Dasar 1945; h) Bhinneka Tunggal Ika; dan i) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

Mempelajari wawasan kebangsaan bertujuan untuk memberi pemahaman tentang Bangsa Indonesia dan dasar-dasar mengenai bangsa ini dalam rangka mewujudkan persatuan. Wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan. Bagi

bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan merupakan nilai mendasar yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa atau karakter politik bangsa, Membaca buku sejarah dan literatur kebangsaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperluas wawasan kebangsaan. Buku-buku ini memberikan informasi tentang sejarah negara dan menggambarkan pengalaman orang-orang yang hidup di masa lalu.

Hal inilah yang membuat Aparatur Sipil Negara secara konsistensinya logis memiliki pemahaman yang baik mengenai wawasan kebangsaan, karena dalam proses rekrutmen diujikan Tes Wawasan Kebangsaan yang menjadi standar awal untuk menjadi ASN. Jumlah ASN yang banyak sesuai dengan pemekaran jumlah provinsi, melihat wilayah Indonesia dan jumlah provinsi yang ada, pemerintah menambah jumlah provinsi untuk membantu kegiatan administratif di Indonesia. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Saat ini di Indonesia terdapat 38 provinsi. Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun setelah pada masa Reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Pemekaran yang dilakukan dimaksud agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan.

38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentunya memiliki aparatur sipil Negara yang membantu setiap provinsi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Adapun total ASN yang tercatat hingga akhir September 2022 sebanyak 4.315.181 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.956.018 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebanyak 359.163. Mayoritas dari total PNS mengisi jabatan fungsional sebanyak 2.103.67 dan jabatan pelaksana sebanyak 1.503.683.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan melihat kebutuhan dari pembelajaran wawasan kebangsaan untuk memperkuat kembali pengetahuan tersebut. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akses mempunyai kantor pusat di Bintaro, Tangerang Selatan. Melalui observasi di lapangan, peneliti mencoba menggali mengapa

terdapat ketidakpahaman mengenai Pancasila, pengamalan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Dari hasil observasi dan wawancara didapatkan bahwa banyak yang telah lupa dan belum memahami secara mendalam mengenai wawasan kebangsaan, materi mengenai wawasan kebangsaan memudar seiring dengan hari pertama Surat Keputusan pengangkatan menjadi ASN. Hal ini dikarenakan para ASN sudah jarang atau tidak dapat pelatihan mendalam kembali mengenai wawasan kebangsaan. Sementara waktu kerja ASN sudah sangat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Hal ini tentu menjadi perhatian dari peneliti dikarenakan dengan adanya wawasan yang luas mengenai wawasan kebangsaan tentu akan menambah khasanah tentang cinta tanah air dan kemungkinan akan memberikan semangat untuk menjadi ASN yang semakin melayani kepentingan publik. Untuk menjawab permasalahan ini maka dibutuhkan suatu solusi agar tingkat kesenjangan antara pemahaman wawasan kebangsaan ASN bisa terjaga atau diharapkan semakin bertambah dengan bekerja sebagai pelayan masyarakat.

Peneliti kemudian mencari solusi melalui jurnal-jurnal dan buku-buku yang membahas mengenai Teknologi Pendidikan, salah satunya ialah dari (Prawiradilaga, 2012) yang membahas mengenai teknologi yang bisa memfasilitasi peserta belajar, teknologi yang sengaja diciptakan untuk pendidikan, Konsep belajar terprogram (*program learning*) memuat langkah belajar teratur dan terperinci, termasuk suatu model teknologi yang sengaja diciptakan untuk kemudahan proses belajar. Ketika semakin di *research* mengenai Teknologi Pendidikan maka didapatkan hubungan antar kawasan bidang yang mengacu pada definisi AECT pada tahun 1994 yang spesifik menyatakan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, desain dan evaluasi. Sementara untuk permasalahan ini dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang bisa mengakomodir kebutuhan para ASN untuk mengiatkan kembali tentang wawasan kebangsaan. Terdapat beberapa temuan dalam jurnal nasional maupun internasional yang telah dibaca dan mengerucut mengenai hal tersebut yaitu pendidikan jarak jauh.

Pendidikan jarak jauh pada dasarnya dipicu oleh adanya kesenjangan yang semakin melebar di antara meningkatnya aspirasi pendidikan dari masyarakat

dengan keterbatasan pelayanan aspirasi pendidikan tersebut. Kesenjangan yang dimaksud disini adalah kesempatan untuk belajar.

Dalam karakteristik pendidikan jarak jauh maka terdapat komponen yang telah dirumuskan oleh Simon dkk pada tahun 2006 yang dikutip oleh (Prawiradilaga, 2013) *Institution Based, Separation of Teacher and Students, Interactive Telecommunication, Sharing of data, voice, video (learning experience)*.

Pendidikan jarak jauh mempunyai metode dalam proses pembelajarannya, metode pertama menggunakan kelas tradisional atau tatap muka seperti biasa, kemudian metode kedua adalah menggunakan *blended learning*, yakni dibagi dua sesi antara sesi kelas tradisional dan kelas *online*, dan yang terakhir adalah kelas *online*, atau menggunakan *Virtual Classroom* dalam proses pembelajarannya.

Virtual classroom termasuk dalam konsep besar Pendidikan jarak jauh, dan terdapat beberapa alasan yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengapa *virtual classroom* yang menjadi poin utama dalam penelitian ini. Pertama ialah fleksibilitas, fleksibel dalam arti waktu yang digunakan dalam belajar tidak hanya bersifat *synchronus*, tetapi bisa juga *asynchronus* sehingga peserta dapat belajar kapan dan dimana saja. Kedua menggunakan metode E-learning, sebagai pembelajarna abad 21 dan masyarakat menuju 4.0 maka pembelajaran menggunakan E Learning menjadi keharusan bagi Indoneisa yang sedang menuju Indonesia maju 2045 yang tentunya ini selaras dengan teknologi 4.0 dan society 5.0. ketiga mudah diakses, dengan menggunakan *internet of thing* maka setiap hari kita memiliki akses untuk berselancar mendapatkan pengetahuan dari internet sehingga memperkaya khasanah dalam proses pembelajaran dalam hal ini pengalaman belajar. keempat adalah biaya yang lebih hemat dalam menggunakan virtual learning, denga memanfaatkan ruang terbuka yang memiliki akses internet secara gratis maka akan menekan biaya yang digunakan oleh peserta.

Secara konvensional, proses belajar mengajar identik dengan adanya pertemuan tatap muka (*face to face*) antara tutor dan peserta yang berlangsung di dalam kelas. Tutor akan memberi materi dan peserta menjadi subyek penerima materi. Interaksi antara tutor dan peserta pun terjadi secara langsung. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, konsep pembelajaran konvensional

tersebut dapat diubah menjadi proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi salah satunya adalah *Sosial Learning Networks* (SLNs). SLNs memungkinkan guru dan siswa menciptakan proses belajar mengajar secara *virtual classroom*. (Rochmah, 2018).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembelajaran secara online adalah dengan menggunakan *Google Classroom*. Peserta hanya perlu menggerakkan *mouse* di *board* atau hanya menyentuh screen komputer serta boleh masuk dan keluar dunia cyber tanpa harus meninggalkan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dari sasaran penelitian ini.

Pemanfaatan *Google Classroom* dapat melalui *multiplatform* yakni dapat melalui komputer dan dapat melalui gawai. Tutor dan peserta dapat mengunjungi situs <https://classroom.google.com> atau dapat mengunduh aplikasi melalui playstore di android atau melalui app store di IOS dengan keyword *Google Classroom*. Penggunaan tersebut tanpa dipungut biaya, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan (Gunanwan, 2016).

Pengguna internet di Indonesia berdasarkan *We Are Social*, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya. Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, di antaranya mobile phone (96%), smartphone (94%), non-smartphone mobile phone (21%), laptop atau komputer desktop (66%), table (23%), konsol game (16%), hingga *virtual reality device* (5,1%). pada tahun ini *We Are Social* menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di medsos. Adapun medsos yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet Indonesia dari paling teratas adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, We Chat, Snapchat, Skype, Tik Tok, Tumblr, Reddit, Sina Weibo (<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>).

Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia maka diasumsikan tidak ada masalah dalam penggunaan internet dalam keseharian, karena sudah dianggap

user friendly kemudian melihat media sosial yang paling banyak digunakan adalah *youtube* maka *youtube* akan dijadikan media untuk proses belajar dalam *live streaming*.

Melihat dari kerangka latar belakang di atas maka, Penelitian ini sangat mendesak dan penting untuk segera dilakukan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dengan menggunakan *virtual learning*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berfokus kepada Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan Berbasis *Virtual Classroom*.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi pada latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan berbasis *virtual classroom*?
2. Bagaimana kelayakan model pembelajaran pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan berbasis *virtual classroom*?
3. Bagaimana efektivitas model pembelajaran pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan berbasis *virtual classroom*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan model pembelajaran wawasan kebangsaan berbasis *virtual classroom*.
2. Untuk merancang mode pembelajaran pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan berbasis *virtual classroom* yang layak.
3. Untuk menciptakan model pembelajaran pendidikan dan pelatihan pembelajaran wawasan kebangsaan berbasis *virtual classroom* yang efektif.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan memiliki signifikansi. Melihat latar belakang yang dikemukakan di atas bahwa radikalisme yang terjadi saat-saat ini menjadi isu yang sangat berkembang secara liar, bahkan menyentuh kepada aparaturnegara. Undang-Undang Subversif yang sudah tidak ada semenjak berakhirnya era Orde Baru membuat leluasa bagi mereka yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Tindakan-tindakan kontra terhadap Pancasila dianggap menjadi hal yang biasa, karena ada pembiaran dan akhirnya hal tersebut semakin menyebabkan kritisnya suasana Indonesia dimana ada potensi besar untuk mengganti ideologi Pancasila.

Dengan munculnya gerakan tersebut (radikalisme) maka dibuatlah Surat keputusan Bersama yaitu SKB ini resmi ditandatangani dan diluncurkan pada 12 November 2019. SKB ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Menkumham, Menteri Agama, Mendikbud, Menkominfo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Melihat urgensi dari isu ini maka dibutuhkan program Pendidikan dan Pelatihan yang bisa mengakomodir kebutuhan dari materi wawasan kebangsaan yang disesuaikan dengan jam dan waktu kerja ASN, karena itulah penelitian ini muncul sebagai solusi dengan konsep *Virtual Learning* sebagai salah satu ranah garapan dari Teknologi Pendidikan.

F. Kebaharuan Penelitian (*State of Art*)

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan pendidikan jarak jauh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan perusahaan yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta yang berkarakter, maka diperlukan suatu metode pengembangan sumber daya manusia. Salah satu cara atau

metode pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Dalam mendiskripsikan analisis manajemen dan pelatihan, penulis menggunakan pendekatan sistem dimana dijabarkan terlebih dahulu mengenai konsep manajemen pendidikan dan pelatihan, kemudian bagaimana proses manajemen pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sumber masukan untuk menganalisis faktor-faktor yang dominan dalam manajemen pendidikan dan pelatihan. Terdapat paling sedikit tujuh faktor yang dominan, yaitu: 1) Penyelenggara Diklat; 2) Instruktur/Pelatih; 3) Peserta; 4) Perencanaan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan; 5) Kurikulum; 6) Sarana dan Prasarana; 7) Pembiayaan. (Edison Siregar, 2018)

2. Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi baik organisasi profit maupun organisasi nonprofit. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus mempunyai kemampuan dan keterampilan (skill) yang baik. Untuk mencapai kedua hal tersebut organisasi bisa melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada, melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam suatu organisasi. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan dalam suatu organisasi maka akan berdampak pada kerugian yang cukup besar dalam organisasi tersebut, akibat banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh para pegawai. Untuk mengurangi hal tersebut, suatu organisasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan untuk para pegawainya, dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia atau pegawai yang terampil, terdidik, dan terlatih dalam menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan melihat atau membaca buku dan materi yang berhubungan dengan

pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

(Sulaiman, 2020)

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendidikan dan pelatihan, terhadap kualitas pengelolaan pembelajaran pada guru-guru SMA di Kecamatan Tabanan secara terpisah maupun simultan. Penelitian ini adalah penelitian *ex post facto* dengan populasi semua guru SMA di Kecamatan Tabanan berjumlah 294 orang, sampel yang digunakan 90 orang dengan teknik *proportional random sampling* melalui undian. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana, regresi ganda, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat kontribusi yang signifikan pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas pengelolaan pembelajaran dengan kontribusi sebesar 49,90% dan sumbangan efektif sebesar 24,95%. Dari hasil penelitian dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya serta pendapat dari ahli maka dapat disimpulkan pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran pada guru sehingga bagi pengambil kebijakan khususnya kepala sekolah untuk memotivasi guru agar mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik guna meningkatkan kualitas pendidikan. (Hariwirawan, 2020)
4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja, pengaruh kompetensi terhadap kinerja, dan pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kompetensi, dan pengaruh pendidikan dan pelatihan menuju kinerja yang dimediasi oleh kompetensi. Penelitian ini adalah dilakukan di PT Bank Riau Kepri Cabang Kantor Pusat Pekanbaru dengan jumlah petugas sebanyak 65 orang sebagai sampel penelitian. *Path Analysis* digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan 0,379 terhadap kinerja, (2) variabel Kompetensi berpengaruh signifikan 0,385 terhadap kinerja, (3) Pendidikan dan pelatihan

variabel berpengaruh signifikan 0,397 terhadap kompetensi, (4). Variabel pendidikan berpengaruh signifikan 0,535 terhadap kinerja yang dimediasi oleh kompetensi. (Hendriyani, 2013)

5. Pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui off the job dan on the job training. Off the job training yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pendekatan on the job training adalah pendekatan pelatihan yang diberikan dengan menyesuaikan metode kerja, melakukan adaptasi dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung. (Fathurrochman, 2017)
6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian Muda dengan Penggerak non-Listrik angkatan 12 di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta tahun 2015 dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi yang digunakan adalah sumber dan metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian Muda dengan Penggerak non-Listrik Angkatan 12 di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta Tahun 2015 dengan menggunakan model evaluasi CIPP secara keseluruhan terlaksana dengan baik, tetapi masih perlu

beberapa perbaikan terkait pengorganisasian kegiatan belajar dan proses pembelajaran guna menghasilkan kualitas dan kuantitas lulusan yang berkompeten dan professional (Setyaningrum, 2016).

7. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak pendidikan dan pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru matematika yang diselenggarakan di PPPPTK Matematika tahun 2013 dan 2014 terhadap perubahan perilaku alumni dalam melakukan kegiatan PKB yang meliputi: (1) bentuk kegiatan PKB setelah diklat, dan (2) kendala/hambatan dalam melakukan kegiatan PKB. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model Empat Level Kirkpatrick. Sampel penelitian ini adalah alumni Diklat PKB Guru Matematika tahun 2013 dan 2014. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikirimkan melalui pos, observasi, dan wawancara terstruktur. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan diklat PKB yang diselenggarakan PPPPTK Matematika belum berdampak banyak terhadap perubahan perilaku alumni (Wijaya: 2017).
8. Era industri 4.0 mengharuskan semua kalangan untuk terus mengembangkan kompetensinya terutama dalam aspek IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Jika tidak demikian, maka ia secara perlahan akan tergeser dan tergantikan bahkan terasingkan dari kemajuan zaman. Karena, individu yang kompeten dan berdaya saing tinggilah yang dibutuhkan. Diklat menjadi solusi yang umum digunakan untuk mengembangkan kompetensi seseorang dalam menghadapi tugasnya. Analisis kebutuhan diklat menjadi tahap yang paling penting dalam penyelenggaraann diklat. Jika penentuan kebutuhan diklat kurang akurat, maka arah pelatihan akan menyimpang dan tidak terarah. Artinya, pelatihan kurang efektif. Analisis kebutuhan diklat guru PAI menjadi suatu kegiatan search, find, note, dan processing data terkait apa yang dibutuhkan

guru PAI/peserta diklat, yang menjadi harapan guru PAI maupun lembaga. Analisis kebutuhan diklat guru PAI sangat penting dilaksanakan apalagi di masa pandemi Covid-19. Karena, pembelajaran diselenggarakan secara daring. Maka, kebutuhan guru PAI akan semakin banyak. Dengan analisis kebutuhan diklat, maka akan diketahui kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi atau diprioritaskan untuk menunjang profesionalisme guru PAI. (Qomariah, 2021)

9. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan komputer Tahun 2019 di Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul, ditinjau dari aspek context, input, process, dan product dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa program pendidikan dan pelatihan Komputer di Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul secara keseluruhan masih belum sesuai dengan standar pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, baik dari aspek context, input, process, maupun product. Namun demikian, derajat ketidaksiannya untuk masing-masing aspek dalam perspektif model CIPP yang dipergunakan masing-masing berbeda (Ernawati: 2020).
10. Kemajuan teknologi informasi khususnya teknologi komunikasi berbasis computer sangat pesat. Kemajuan teknologi komunikasi komputer tersebut menawarkan cara alternatif untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer menuntut peserta didik terlibat aktif dan partisipatif dalam proses pembelajarannya. Peserta didik dituntut untuk berinisiatif untuk menentukan apa, bagaimana dan kapan kegiatan belajar akan dilakukan. Pembelajaran melalui web menuntut bukan saja

ketrampilan peserta didik seperti terampil mengoperasikan komputer, membaca dan menulis tapi juga menuntut perilaku pribadi yang terbuka, disiplin dan mandiri. Skenario mengajar dan belajar perlu disiapkan secara matang dalam sebuah kurikulum pembelajaran yang memang dirancang berbasis web. Mengimplementasikan pembelajaran berbasis web bukan berarti sekedar meletakkan materi ajar pada web. Selain materi ajar, skenario pembelajaran perlu disiapkan dengan matang untuk mengundang keterlibatan peserta didik secara aktif dan konstruktif dapat proses belajar mereka. Mengkombinasikan antara pertemuan secara tatap muka dengan pembelajaran berbasis web dapat meningkatkan kontribusi dan interaktifitas antar peserta didik. Melalui tatap muka peserta didik dapat mengenal sesama peserta didik dan guru pendampingnya. Keakraban ini sangat menunjang kerja kolaborasi mereka secara virtual. Persiapan matang sebelum mengimplementasikan sebuah pembelajaran berbasis web memegang peran penting demi kelancaran proses pembelajaran. Segala persiapan seperti penjadwalan sampai dengan penentuan teknis komunikasi selama proses pembelajaran merupakan tahapan penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis web. (Lawanto, 2000)

11. Evaluasi Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dilakukan untuk mengevaluasi: (1) dasar dan tujuan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV, serta kelayakan penyelenggaraan lembaga, (2) kejelasan karakteristik peserta Diklat, keadaan dosen, kurikulum, sarana dan prasarana, (3) kesesuaian dengan kurikulum dan jadwal program, kompetensi pembelajaran dan Dosen Diklat, (4) penilaian secara keseluruhan terhadap peserta, dosen dan penyelenggara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluasi program menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan: (1) membumikan program sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari program layak untuk meningkatkan kompetensi Eselon IV, (2) peserta memenuhi kriteria,

tetapi dosen administrasi masih sangat terbatas. Kurikulum mengacu pada pedoman, fasilitas memenuhi kelayakan standar, (3) kesesuaian program dengan kurikulum dan jadwal yang memenuhi kriteria, (4) keseluruhan hasil peserta, dosen dan penyelenggara memenuhi kriteria (Tulung, 2014).

12. Penelitian ini didasarkan pada fenomena rendahnya kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka dilakukan pendidikan dan pelatihan. Fokus penelitian ini adalah efektivitas pendidikan dan pelatihan, evaluasi efektivitas pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sudah cukup efektif, dilihat dari hasil evaluasi setelah pendidikan dan pelatihan yaitu terjadi perubahan sikap dan perilaku pada diri pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih baik daripada sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan dan kinerja pegawai juga meningkat dari sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Faktor yang menghambat efektivitas pendidikan dan pelatihan adalah terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan. Saran penelitian ini adalah salah satu usaha yang dilakukan agar pendidikan dan pelatihan tetap berjalan yaitu dengan biaya sendiri (Meitaningrum).

13. Pada umumnya setiap instansi selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawan, termasuk dengan cara memberi pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Penelitian ini membahas masalah pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kalasey. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kalasey. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Variasi (naik-turunnya) kinerja karyawan yang dijelaskan oleh variabel pelatihan sebesar 67,9% sedangkan sisanya 32,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. (Turere, 2021).

14. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel pendidikan dan pelatihan dalam bentuk metode yang digunakan, materi diklat dan pelatih diklat terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang, untuk mengetahui pengaruh secara parsial variable pendidikan dan pelatihan dalam bentuk metode yang digunakan, materi diklat dan pelatih diklat terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang, dan untuk mengetahui variabel mana dari pendidikan dan latihan yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang sebanyak 220 orang dengan jumlah sampel sebanyak 70 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Proportional Stratified Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, observasi dan dokumnetasi. Alat uji instrumen penelitian ini adalah uji validitas dan uji reabilitas. Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis data dan diperkuat dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Hasil analisa data menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang dan variabel materi diklat merupakan variabel yang paling dominan (Dartha, 2010).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan pencarian peneliti tentang pemberian penguatan kembali pada materi wawasan kebangsaan menggunakan model *Virtual learning*, hasilnya belum ditemukan pendidikan dan pelatihan yang menggunakan model sejenis, maka penelitian ini dianggap berbeda pada pengembangan model pendidikan dan pelatihan jarak jauh

menggunakan *virtual learning* yang berfokus terhadap materi wawasan kebangsaan, sebagai kebaruan penelitian ini (*state of the art*).



